

ABSTRAK

PERAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH PASCA PEMBERLAKUAN FIDUSIA ONLINE (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)

Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan tempat untuk mendaftarkan jaminan fidusia, berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang wajibkan untuk melakukan pembiayaan konsumen, sehingga pendaftaran fidusia melonjak. Keluar Surat Edaran Direktur Jenderal AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Fidusia online dikelola oleh Dirjen AHU.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan peran KPF pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebelum dan pasca pemberlakuan fidusia online, mengetahui kelemahan pelaksanaan dan cara mengatasi kelemahan pelaksanaan peran KPF pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder berasal dari berbagai sumber, antar lain studi pustaka, wawancara dengan pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Metode analisis adalah analisis kualitatif, yang pengambilan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPF pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebelum fidusia online melayani pendaftaran jaminan fidusia, pasca fidusia online tidak menerima pendaftaran fidusia online. Kelemahan pelaksanaan peran KPF pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pasca pemberlakuan fidusia online tidak melayani pendaftaran jaminan fidusia online. Kendala yang menjadi kelemahan dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pelayanan publik terkait fidusia online adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang memadai dan terbatasnya sarana dan prasarana berupa jaringan internet. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, petugas harus responsif, mau mendengar keluhan, saran dan aspirasi dari masyarakat, memberikan pelayanan dengan ramah dan senyum. Untuk mengatasi kelemahan dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pelayanan publik terkait fidusia online, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan pembenahan dan peningkatan dalam hal kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana berupa jaringan internet.

Kata kunci: *Peran, Kantor Pendaftaran Fidusia, Fidusia Online.*

ABSTRACT

ROLE FIDUSIA REGISTRATION OFFICE AT OFFICE REGION MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS CENTRAL JAVA FIDUCIARY ENFORCEMENT POST ONLINE (Case Study at the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in Central Java)

Fiduciary Registration Office at the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights is a place to register a fiduciary, based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. Minister of Finance Regulation No. 130 / PMK.010 / 2012 concerning the Registration Fiduciary for finance companies who require to conduct consumer financing, so the fiduciary registration soared. The Letter of the Director General of the AHU No. AHU-06.OT.03.01 in 2013 on the Application of Fiduciary Administration System Electronic Registration (Online System) in accordance with Law No. 25 of 2009 on Public Service. Online fiduciary managed by Dirjen AHU.

This study intends to clarify the role of KPF on the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in Central Java before and after the imposition of fiduciary online, identify the weaknesses in implementation and ways to overcome the shortcomings of the KPF role of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in Central Java after the imposition of fiduciary online.

In conducting this study the author uses empirical juridical approach. specification research using descriptive analysis, data collection through primary data and secondary data from various sources, among others literature, interviews with the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in Central Java. The method of analysis is qualitative analysis, which is making deductive conclusions.

The results showed that the role of KPF on the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in Central Java before serving registration online fiduciary fiduciary post online do not accept the registration of fiduciary online. KPF role of the shortcomings of the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in Central Java after the imposition of fiduciary online does not serve fiduciary guarantee registration online. Constraints are the weaknesses in the implementation as providers of public services related to fiduciary online is the quality and quantity of human resources are still inadequate and of limited facilities and infrastructure such as the Internet network. As providers of public services, the officer must be responsive, willing to hear complaints, suggestions and aspirations of the community, providing service with a friendly smile. To overcome weaknesses in the implementation as providers of public services related to fiduciary online, Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights in Central Java to reform and improvements in the quality and quantity of human resources, facilities and infrastructure such as the Internet network.

Keywords: Role of the Registrar of fiduciary, fiduciary Online.